

## **Analisis Potensi Sektor Ekonomi Dan Sektor Basis Di Bakorwil Madiun Di Empat Kabupaten / Kota**

**Firda Rahmania, Niniek Imaningsih, Riko Setya Wijaya**

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur

Email: [firdarahmanianing@gmail.com](mailto:firdarahmanianing@gmail.com)

---

### **Article Info**

#### **Article history:**

Published: June 19,2022

Page: 116-128

#### **Keyword:**

*Sektor Pendorong  
Ekonomi; Sektor Basis;  
Produk Domestik  
Regional Bruto*

### **Abstract**

Tujuan dari penelitian ini, antara lain: untuk mengetahui sektor pendorong ekonomi, sektor yang pertumbuhannya lebih tinggi dari sektor yang sama, sektor yang mengalami pertumbuhan lebih tinggi dari sektor yang berbeda dan sektor-sektor basis, di Kabupaten Madiun, Kabupaten Magetan, Kabupaten Ponorogo, dan Kota Madiun. Hasil penelitian didapatkan sektor yang mendorong ekonomi di empat Kabupaten/Kota adalah sektor informasi & komunikasi, jasa keuangan & asuransi, jasa pendidikan, jasa kesehatan & kegiatan sosial. Lalu, sektor informasi & komunikasi, jasa kesehatan & kegiatan sosial, jasa pendidikan, jasa keuangan & asuransi, menjadi salah satu sektor basis dari 17 sektor dan berkontribusi terhadap produk domestik regional bruto di Badan Kordinasi Wilayah Madiun khususnya di empat Kabupaten/Kota. Sektor yang banyak bergeser di empat Kabupaten/Kota adalah sektor jasa keuangan & asuransi.

**Kata Kunci:** Sektor Pendorong Ekonomi; Sektor Basis; Produk Domestik Regional Bruto

*The objectives of this study, among others: to determine the economic driving sectors, sectors with higher growth than the same sector, sectors experiencing higher growth from different sectors and basic sectors, in Madiun Regency, Magetan Regency, Ponorogo Regency, and the City of Madiun. The results showed that the sectors that drive in four districts/cities are the information & communication sector, financial services & insurance, education services, health services & social activities. The sector that has shifted a lot in the four regencies/cities in the financial services & insurance sector.*

**Keywords:** Economic Driving Sector; Base Sector; Gross Regional Domestic Product

Copyright © 2022 OECONOMICUS Journal of Economics

---

### **Pendahuluan**

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut Rahardja & Manurung (2008) yaitu total dari selisih harga semua

unit produksi pada suatu daerah di periode tertentu, ataupun jumlah seluruh selisih harga barang dan jasa dari semua unit produksi pada periode tertentu di suatu

daerah. Terdapat dua versi untuk menghitung PDRB penilaian harga pasar, diantaranya: PDRB dasar harga berlaku dan harga konstan.

Badan Pusat Statistik (2022) menyatakan bahwa PDRB harga berlaku dapat digambarkan sebagai jumlah selisih harga barang dan jasa atas harga pasar di periode tertentu. Data PDRB harga berlaku dimanfaatkan dalam mengetahui struktur ekonomi dan perubahannya, serta berguna untuk menghitung besar pendapatan perkapita. Lalu, PDRB harga konstan menyatakan perhitungan selisih harga barang dan jasa di suatu periode menggunakan tahun dasar untuk mengukur kecepatan pertumbuhan ekonomi. Periode saat ini, tahun dasar yang digunakan yaitu tahun 2000.

Beberapa sektor ekonomi yang masuk dalam komponen PDRB diantaranya: transportasi & pergudangan, industri pengolahan, pertanian, perdagangan besar & eceran, pertambangan & penggalian, bangunan, listrik, gas & air bersih, real estate informasi & komunikasi, pertahanan & jaminan sosial wajib, penyediaan akomodasi makan & minum, jasa keuangan & asuransi, administrasi pemerintah, jasa kesehatan, jasa pendidikan, jasa perusahaan, dan lain sebagainya (Sjafrizal, 2014).

Menurut Daryono (2015) dalam meningkatkan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi suatu daerah, maka harus mengetahui potensi ekonomi dan memanfaatkannya secara efisien dan efektif. Pengembangan potensi ekonomi pada sektor basis menjadi prioritas utama karena dapat berperan besar bagi kemajuan

ekonomi daerah (Purnomo dan Soejoto, 2013). Sedangkan, menurut Elsjamina (2014), untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi regional yang berperan dalam total PDRB, maka dibutuhkan penggerak dalam pembangunan ekonomi, yaitu pembangunan sektor basis. Sektor tersebut, dapat digunakan sebagai pendorong sektor lain untuk berkembang, seperti: sebagai penyuplai input, atau menggunakan output sektor basis untuk input dalam proses produksinya (Widodo, 2006).

Badan Koordinasi Wilayah (BAKORWIL) Madiun sebagai salah satu instansi pembantu Gubernur yang berada di Provinsi Jawa Timur juga berperan untuk merealisasikan pembangunan nasional dari pencapaian pembangunan daerah. Terealisasinya pembangunan nasional, tidak lepas atas kesuksesan pembangunan daerah, dan hal tersebut termasuk tugas penting pemerintah daerah yang di bawahi Badan Koordinasi Wilayah Madiun, yang terdiri dari dua Kota dan delapan Kabupaten, diantaranya Kota Kediri dan Kota Madiun, Kabupaten Kediri, Kabupaten Magetan, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Trenggalek Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Madiun, dan Kabupaten Pacitan.

Berdasarkan uraian di atas, tentang sektor ekonomi dan PDRB di Badan Koordinasi Wilayah Madiun yang menjadi permasalahan, maka peneliti melakukan penelitian tentang “Analisis Sektor Ekonomi di Bakorwil Madiun di empat Kabupaten/Kota”. Tujuan yang akan dicapai yaitu untuk mengetahui sektor pendorong ekonomi, sektor yang pertumbuhannya lebih tinggi dari sektor

yang sama, sektor yang mengalami pertumbuhan lebih tinggi dari sektor yang berbeda dan sektor-sektor basis, di Kabupaten Madiun, Kabupaten Magetan, Kabupaten Ponorogo, dan Kota Madiun.

## **Kajian Pustaka**

### **Teori Basis Ekonomi**

Sektor basis atau sektor basis, hakikatnya harus dilakukan perbandingan, baik melakukan perbandingan di skala internasional, regional, ataupun nasional. Dari sudut pandang internasional, unggulnya suatu sektor dapat terjadi apabila suatu sektor dapat bersaing sesama sektor dari negara lain. Lalu, dari sudut pandang nasional, unggulnya suatu sektor dapat terjadi jika sektor di suatu daerah tersebut dapat bersaing sesama sektor dari daerah lain, dilingkup nasional atau domestik.

Teori basis ekonomi yang dinyatakan oleh Tarigan (2005) menyatakan bahwa kecepatan pertumbuhan ekonomi daerah dapat terjadi karena tingginya permintaan ekspor dari daerah tersebut. Teori basis terbagi atas dua sektor, diantaranya basis dan non-basis. Kegiatan basis diartikan sebagai kegiatan ekonomi yang menghasilkan barang dan jasa untuk dipasarkan secara ekspor. Lalu, Kegiatan ekonomi non-basis diartikan sebagai kegiatan ekonomi yang menghasilkan barang dan jasa untuk dipasarkan di wilayahnya saja (bersifat lokal) demi memenuhi kebutuhan masyarakatnya.

### **Sektor Ekonomi Potensial/Basis**

Sektor basis merupakan sektor perekonomian yang dapat memicu pembangunan serta pertumbuhan ekonomi suatu wilayah tanpa merusak lingkungan dan menjatuhkan sektor lain. Sektor

ekonomi basis termasuk sektor yang unggul di beberapa tahun terakhir dan sektor tersebut sangat mementingkan persoalan sosial dan lingkungan (Widodo, 2006).

Sektor ekonomi potensial/basis merupakan sektor produktif yang berpotensi dalam pembangunan dan basis perekonomian suatu wilayah yang terkait secara langsung ataupun tidak (Tjokroamidjojo, 1993).

Berikut ini adalah kriteria sektor ekonomi yang potensial:

1. Mempunyai daya saing cukup bagus daripada sektor yang sama pada wilayah lain. Sektor yang unggul, jika mengalami perkembangan, maka dapat memicu perkembangan di sektor lain yang dapat terlihat langsung ataupun tidak langsung dan dampak positif terhadap perekonomian wilayah.
2. Mempunyai SDM dan SDA yang dapat mendukung pengembang. Apabila memiliki sumber daya yang besar, maka pertumbuhan sektor ekonomi di wilayah tersebut akan semakin tinggi.
3. Memiliki barang dan jasa untuk diekspor. Jika semakin banyak kegiatan ekspor dilakukan, maka akan semakin besar pendapatan yang diperoleh.

### **Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)**

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan tolak ukur dalam menunjukkan tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah yang bisa dilihat dari kesejahteraan penduduknya, bukan hanya tentang hasil pembangunan yang distribusikan (Sadono, 2005). PDRB juga diartikan sebagai total dari selisih harga dari seluruh barang produksi di periode tertentu pada suatu daerah. Terdapat dua versi dalam menghitung PDRB penilaian

harga pasar, diantaranya PDRB dasar harga berlaku dan PDRB dasar konstan.

PDRB dasar harga berlaku menunjukkan selisih harga barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku setiap tahun agar pergeseran dan struktur ekonomi bisa diketahui. Lalu, PDRB dasar harga konstan menggambarkan selisih harga barang dan jasa yang dihitung dengan harga yang berlaku pada tahun tertentu sebagai tahun dasar agar pertumbuhan ekonomi setiap tahun dapat diketahui (Badan Pusat Statistik, 2016). PDRB harga konstan juga digunakan untuk perhitungan selisih harga barang dan jasa didasarkan atas harga di periode tertentu (Sadono, 2005).

### Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan deskriptif kuantitatif. Jenis data

menggunakan data skunder diantaranya data PDRB dasar harga konstan di tahun 2014-2018 dari Badan Pusat Statistik berupa, jurnal, serta literatur relevan.

Data tersebut, kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis *Location Quotient* (LQ) dan *Shift-Share*. Analisis LQ digunakan untuk menentukan kategori dan perbandingan peran sektor basis dan non-basis di tingkat nasional. Sedangkan, penggunaan analisis *Shift-Share* untuk mengetahui perubahan pada sektor dalam perekonomian daerah melalui perbandingan penggambaran kinerja sektor perekonomian wilayah dan nasional.

### Hasil dan Pembahasan

**Tabel 1. Hasil Analisis *Location Quotient* (LQ) di Empat Kabupaten/Kota Tahun 2014-2018**

Sektor	Kabupaten Madiun		Kabupaten Magetan		Kabupaten Ponorogo		Kota Madiun	
	Rata-rata	Ket.	Rata-rata	Ket.	Rata-rata	Ket.	Rata-rata	Ket.
Pertanian, kehutanan, dan perikanan	2,61	B	2,59	B	2,34	B	0,07	NB
Pertambangan & penggalian	0,20	NB	0,29	NB	0,45	NB	0,00	NB
Industri pengolahan	0,34	NB	0,33	NB	0,23	NB	0,58	NB
Pengadaan listrik & gas	0,30	NB	0,2	NB	0,28	NB	0,25	NB
Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah & daur ulang	1,75	B	2,37	B	0,99	NB	2,21	B
Konstruksi	1,49	B	0,87	NB	1,00	B	0,69	NB
Perdagangan besar & eceran, reparasi mobil & sepeda motor	0,88	NB	0,84	NB	0,96	NB	1,26	B
Transportasi & pergudangan	0,54	NB	0,5	NB	0,58	NB	0,99	NB
Penyediaan akomodasi & makan minum	0,45	NB	0,81	NB	0,56	NB	0,93	NB
Informasi & komunikasi	1,41	B	1,39	B	1,53	B	2,8	B
Jasa keuangan & asuransi	1,09	B	1,01	B	1,34	B	3,53	B

<i>Real estate</i>	1,04	B	0,84	NB	1,53	B	1,46	B
Jasa perusahaan	0,43	NB	0,43	NB	0,57	NB	0,92	NB
Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	2,57	B	3,50	B	2,39	B	1,44	B
Jasa pendidikan	1,66	B	1,57	B	3,17	B	2,75	B
Jasa kesehatan & kegiatan sosial	1,33	B	1,32	B	1,21	B	1,92	B
Jasa lainnya	1,43	B	2,37	B	1,43	B	2,58	B

Keterangan:

B : Basis

NB : Non-Basis

Berdasarkan Tabel 1, hasil rata-rata perhitungan LQ di empat Kabupaten/Kota pada tahun 2014-2018, dapat dijelaskan sebagai berikut: (1) di Kabupaten Madiun, terdapat 10 sektor basis dan 7 sektor non-basis. Di mana, sektor basis pertanian, kehutanan, dan perikanan memiliki nilai LQ tertinggi yaitu 2,61. Lalu, sektor basis *real estate* mendapatkan nilai LQ terendah sebesar 1,04. (2) di Kabupaten Magetan, terdapat 8 sektor basis dan 9 sektor non-

basis. Di mana, sektor basis administrasi pemerintahan, pertahanan, & jaminan sosial wajib memiliki nilai LQ tertinggi yaitu 3,50. Lalu, sektor basis jasa keuangan & asuransi mendapatkan nilai LQ terendah 1,01. (3) di Kabupaten Ponorogo, terdapat 9 sektor basis dan 8 sektor non-basis. Di mana, sektor basis jasa pendidikan memiliki nilai LQ tertinggi yaitu sebesar 3,17. Lalu, sektor basis konstruksi mendapatkan nilai LQ terendah sebesar 1,00. (4) di Kota Madiun, terdapat 9 sektor basis dan 8 sektor non-basis. Di mana, sektor basis jasa keuangan & asuransi memiliki nilai LQ tertinggi yaitu 3,53. Lalu, sektor basis reparasi mobil & sepeda motor, dan perdagangan besar & eceran

mendapatkan nilai LQ terendah sebesar 1,26.

Dari hasil perhitungan analisis *Location Quotion* (LQ) disimpulkan bahwa sektor informasi & komunikasi, jasa kesehatan & kegiatan, jasa jasa keuangan & asuransi, pendidikan, sosial selama 5 tahun berturut-turut di empat Kabupaten/Kota termasuk sektor basis dalam perekonomian di wilayah tersebut.

Sektor informasi & komunikasi yang ada di beberapa kabupaten yaitu kantor pos atau rumah pos. Tempat tersebut sebagai pemberi pelayanan komunikasi tertulis (surat), logistik, transaksi keuangan, pengiriman paket, dan kerjasama kemitraan atau agen untuk kepentingan lainnya.

Kabupaten Madiun memiliki 15 unit kantor pos pembantu yang menunjang pengiriman surat/barang atau pelayanan lainnya. Sedangkan di Kabupaten Magetan memiliki sebanyak 14 unit kantor pos pembantu untuk menunjang pengiriman surat/barang dan pelayanan lainnya. Dari 18 kecamatan, terdapat 4 kecamatan yang tidak memiliki kantor pos yaitu Kecamatan Poncol, Nguntoronadi, Sidorejo, dan Kartoharjo. Lalu, Kabupaten Ponorogo memiliki 13 unit kantor pos pembantu yang menunjang pengiriman surat/barang atau pelayanan lainnya. Dari 21 kecamatan, terdapat 8 kecamatan yang tidak memiliki kantor pos yaitu Kecamatan Ngrayun,

Sooko, Pudak, Mlarak, Siman, Jambon, Sukorejo, dan Ngebel. Kemudian, Kota Madiun memiliki sebanyak 4 unit kantor pos pembantu yang menunjang pengiriman surat/barang atau pelayanan lainnya. Dari 3 kecamatan, terdapat 1 kecamatan yang tidak memiliki kantor pos yaitu Kecamatan Mangu Harjo.

Pada sektor jasa keuangan & asuransi, terdapat koperasi yang termasuk badan usaha yang telah berbadan hukum dan mempunyai beberapa anggota dengan berkegiatan atas prinsip koperasi yang berfungsi sebagai penggerak ekonomi rakyat atas asas kekeluargaan.

Kabupaten Madiun mempunyai jumlah koperasi aktif cenderung meningkat pada tahun 2017 yaitu 674 unit dan di tahun 2020 menjadi 685 unit. Kecamatan yang paling banyak memiliki koperasi aktif adalah Kecamatan Kebonsari sebanyak 66 unit, sedangkan yang paling sedikit yaitu Kecamatan Kare sebanyak 18 unit. Lalu, Kabupaten Magetan, jumlah koperasi aktif cenderung meningkat pada tahun 2017 yaitu 819 unit dan di tahun 2020 menjadi 835 unit. Kecamatan yang paling banyak memiliki koperasi aktif adalah Kecamatan Magetan sebesar 142 unit, sedangkan yang paling sedikit memiliki koperasi aktif adalah Kecamatan Nguntoronadi sebanyak 21 unit di tahun 2020. Kemudian, Kabupaten Ponorogo, jumlah koperasi aktif dan mengalami peningkatan dari 785 unit (2017) menjadi 821 unit (2020). Kecamatan yang paling banyak memiliki koperasi aktif adalah Kecamatan Ponorogo (209 unit), sedangkan yang paling sedikit memiliki koperasi aktif adalah Kecamatan Pudak (14 unit) di tahun 2020. Terakhir, di Kota Madiun jumlah koperasi aktif dan mengalami peningkatan dari 297 unit di

tahun 2016 menjadi 302 unit pada tahun 2020. Kecamatan yang paling banyak memiliki koperasi aktif adalah Kecamatan Taman sebanyak 136 unit, sedangkan yang paling sedikit memiliki koperasi aktif adalah Kecamatan Mangu Harjo sebanyak 82 unit di tahun 2019.

Pada sektor jasa pendidikan, tahun 2019/2020 didasarkan pada data BPS, dapat dijelaskan bahwa: (1) Kabupaten Madiun tercatat jumlah sarana pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Taman Kanak-Kanak (TK) sebanyak 331 unit, terdiri dari 5 unit TK Negeri dan 326 unit TK Swasta. Sekolah Dasar (SD) sebanyak 406 unit, terdiri dari 402 SD Negeri dan 4 SD Swasta. Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebanyak 48 unit, terdiri dari 37 SMP Negeri dan 11 SMP Swasta. Sekolah Menengah Atas (SMA) sebanyak 13 unit, terdiri dari 10 unit SMA Negeri dan 3 SMA Swasta. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebanyak 30 unit, terdiri dari 8 SMK Negeri dan 22 SMK Swasta. Dan Madrasah Aliyah (MA) sebanyak 21 unit, terdiri dari 4 MA Negeri dan 17 MA Swasta. (2) Kabupaten Magetan tercatat jumlah sarana pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Taman Kanak-Kanak (TK) sebanyak 389 unit, terbagi atas 5 unit TK Negeri dan 384 unit TK Swasta. Sekolah Dasar (SD) sebanyak 478 unit, terdiri dari 462 SD Negeri dan 16 SD Swasta. Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebanyak 57 unit, terdiri dari 39 SMP Negeri dan 18 SMP Swasta. Sekolah Menengah Atas (SMA) sebanyak 15 unit, terdiri dari 10 unit SMA Negeri dan 5 SMA Swasta. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebanyak 34 unit, terbagi atas 6 SMK Negeri dan 28 SMK Swasta. Dan Madrasah Aliyah (MA)

sebanyak 20 unit, terdiri dari 3 MA Negeri dan 17 MA Swasta. (3) Kabupaten Ponorogo tercatat jumlah sarana pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Taman Kanak-Kanak (TK) sebanyak 456 unit, terdiri dari 2 unit TK Negeri dan 456 unit TK Swasta. Sekolah Dasar (SD) sebanyak 591 unit, terdiri dari 570 SD Negeri dan 21 SD Swasta. Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebanyak 92 unit, terdiri dari 56 SMP Negeri dan 36 SMP Swasta. Sekolah Menengah Atas (SMA) sebanyak 27 unit, terdiri dari 16 unit SMA Negeri dan 11 SMA Swasta. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebanyak 46 unit, terdiri dari 8 SMK Negeri dan 38 SMK Swasta. (4) Kota Madiun tercatat jumlah sarana pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Taman Kanak-Kanak (TK) sebanyak 94 unit, terdiri dari 1 unit TK Negeri dan 93 unit TK Swasta. Sekolah Dasar (SD) sebanyak 71 unit, terdiri dari 56 SD Negeri dan 15 SD Swasta. Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebanyak 23 unit, terdiri dari 14 SMP Negeri dan 9 SMP Swasta. Sekolah Menengah Atas (SMA) sebanyak 12 unit, terdiri dari 6 unit SMA Negeri dan 6 SMA Swasta. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebanyak 30 unit.

Menurut Oktavia dan Farida (2020), pendidikan yang berkualitas sangat diperlukan untuk terwujudnya SDM yang berkualitas. Oleh sebab itu, sarana dan prasarana penunjang sangat diperlukan, misalnya: adanya sekolah yang layak dan jumlah guru sepadan dari TK hingga pendidikan tinggi. Di empat Kabupaten/Kota fasilitas pendidikan dasar dan menengah tersedia pada setiap level pendidikan di setiap kecamatan di daerah tersebut.

Tidak hanya pembangunan yang menjadi tujuan utama Pemerintah di empat Kabupaten/Kota, tetapi juga memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sektor pendidikan. Misalnya dengan menambah jumlah pengajar atau guru yang berkualitas pada sekolah TK-SMA.

Pada sektor kesehatan, meningkatkan kualitas hidup masyarakat merupakan bagian dari tujuan pembangunan. Kualitas kesehatan termasuk bagian dari kualitas hidup (Afiyanti, 2010). Oleh karena itu, berbagai upaya akan dilakukan pemerintah agar masyarakat dengan mudah dan merata mendapatkan layanan kesehatan. Salah satu upayanya yaitu dengan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, membangun dan melengkapi fasilitas atau sarana dan prasarana kesehatan. Saat ini, fasilitas kesehatan dapat ditemui dengan mudah, misalnya tersedianya Puskesmas di setiap kecamatan dan Puskesmas Pembantu di beberapa desa.

Tersedianya sarana dan prasarana kesehatan yang layak termasuk bagian dari layanan kesehatan bagi masyarakat (Suharmiati, Handayani, dan Kristiana, 2012). Adapun sarana kesehatan di Kabupaten Madiun pada tahun 2020, diantaranya 4 unit Rumah Sakit, 26 unit Puskesmas, 15 unit Poliklinik, 61 unit Puskesmas Pembantu, dan 52 unit Apotek. Sedangkan, di Kabupaten Magetan pada tahun 2020 memiliki sarana kesehatan diantaranya 2 unit Rumah Sakit, 4 unit Rumah Sakit Bersalin, 23 unit Puskesmas, 11 unit Poliklinik, 60 unit Puskesmas Pembantu, dan 63 unit Apotek. Lalu, Kabupaten Ponorogo pada tahun 2020 memiliki sarana kesehatan diantaranya 5 unit Rumah Sakit, 33 unit Puskesmas, 28

unit Poliklinik, 56 unit Puskesmas Pembantu, dan 48 unit Apotek. Kemudian, Kota Madiun tahun 2020 memiliki sarana kesehatan diantaranya 6 unit Rumah Sakit,

6 unit Puskesmas, 11 unit Poliklinik, 18 unit Puskesmas Pembantu, dan 23 unit Apotek.

**Tabel 2. Hasil Analisis *Shift Share* di Kabupaten Madiun dan Kabupaten Magetan**

Analisa	Kabupaten Madiun		Kabupaten Magetan	
	2016-2017	2017-2018	2016-2017	2017-2018
<p><i>Shift Share (Potential Regional)</i></p> <p>Sektor yang mendorong pertumbuhan sektor yang sama di tingkat Provinsi Jawa Timur.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Informasi &amp; komunikasi</li> <li>2. Industri pengolahan</li> <li>3. <i>Real estate</i></li> <li>4. Kontruksi</li> <li>5. Perdagangan besar &amp; eceran, reparasi mobil &amp; sepeda motor</li> <li>6. Jasa pendidikan</li> <li>7. Pertanian, kehutanan, &amp; perikanan</li> <li>8. Jasa keuangan &amp; asuransi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Informasi &amp; komunikasi</li> <li>2. Industri pengolahan</li> <li>3. Kontruksi</li> <li>4. Pengadaan listrik &amp; gas</li> <li>5. Penyediaan akomodasi &amp; makan minum</li> <li>6. Perdagangan besar &amp; eceran, reparasi mobil &amp; sepeda motor</li> <li>7. Transportasi &amp; pergudangan</li> <li>8. Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah &amp; daur ulang</li> <li>9. Jasa kesehatan &amp; kegiatan sosial</li> <li>10. Jasa keuangan &amp; asuransi</li> <li>11. <i>Real estate</i></li> <li>12. Jasa pendidikan</li> <li>13. Jasa perusahaan</li> <li>14. Jasa lainnya</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan akomodasi &amp; makan minum</li> <li>2. Industri pengolahan</li> <li>3. Informasi &amp; komunikasi</li> <li>4. Perdagangan besar &amp; eceran, reparasi mobil &amp; sepeda motor</li> <li>5. Transportasi &amp; pergudangan</li> <li>6. Kontruksi</li> <li>7. Jasa kesehatan &amp; kegiatan sosial</li> <li>8. Jasa perusahaan</li> <li>9. Jasa lainnya</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Industri pengolahan</li> <li>2. Penyediaan akomodasi &amp; makan minum</li> <li>3. Transportasi &amp; pergudangan</li> <li>4. Pengadaan listrik &amp; gas</li> <li>5. Kontruksi</li> <li>6. Informasi &amp; komunikasi</li> <li>7. Jasa pendidikan</li> <li>8. Perdagangan besar &amp; eceran, reparasi mobil &amp; sepeda motor</li> <li>9. Jasa perusahaan</li> <li>10. <i>Real estate</i></li> <li>11. Jasa kesehatan &amp; kegiatan sosial</li> <li>12. Jasa lainnya</li> </ol>
<p><i>Shift Share (Proportional Shift)</i></p> <p>Sektor yang tumbuh relatif cepat ditingkat Provinsi Jawa Timur.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pertambangan &amp; penggalian</li> <li>2. Transportasi &amp; pergudangan</li> <li>3. Industri pengolahan</li> <li>4. Perdagangan besar &amp; eceran, reparasi mobil &amp; sepeda motor</li> <li>5. Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah &amp; daur ulang</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Industri pengolahan</li> <li>2. Kontruksi</li> <li>3. <i>Real estate</i></li> <li>4. Perdagangan besar &amp; eceran, reparasi mobil &amp; sepeda motor</li> <li>5. Penyediaan akomodasi &amp; makan minum</li> <li>6. Informasi &amp; komunikasi</li> <li>7. Transportasi &amp; pergudangan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pertambangan &amp; penggalian</li> <li>2. Informasi &amp; komunikasi</li> <li>3. Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah &amp; daur ulang</li> <li>4. Transportasi &amp; pergudangan</li> <li>5. Industri pengolahan</li> <li>6. Perdagangan besar &amp; eceran, reparasi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Industri pengolahan</li> <li>2. Penyediaan akomodasi &amp; makan minum</li> <li>3. Perdagangan besar &amp; eceran, reparasi mobil &amp; sepeda motor</li> <li>4. Informasi &amp; komunikasi</li> <li>5. Kontruksi</li> <li>6. Transportasi &amp; pergudangan</li> <li>7. <i>Real estate</i></li> </ol>

	6. Penyediaan akomodasi & makan minum 7. Informasi & komunikasi 8. Kontruksi 9. Jasa perusahaan	8. Jasa kesehatan & kegiatan sosial 9. Jasa perusahaan	mobil & sepeda motor 7. Kontruksi 8. Penyediaan akomodasi & makan minum 9. Jasa perusahaan	8. Jasa kesehatan & kegiatan sosial 9. Jasa perusahaan
<i>Shift Share (Differential Shift)</i> Sektor yang mempunyai keuntungan lokasional.	1. Pengadaan listrik & gas 2. Perdagangan besar & eceran, reparasi mobil & sepeda motor 3. Industri pengolahan 4. Transportasi & pergudangan 5. Kontruksi 6. Administrasi pemerintah, pertahanan dan jaminan sosial wajib 7. Penyediaan akomodasi & makan minum 8. Informasi & komunikasi 9. <i>Real estate</i> 10. Jasa pendidikan 11. Jasa perusahaan 12. Jasa keuangan & asuransi	1. Industri pengolahan 2. Pertambangan & penggalian 3. Perdagangan besar & eceran, reparasi mobil & sepeda motor 4. Informasi & komunikasi 5. Kontruksi 6. Transportasi dan pergudangan 7. Pengadaan listrik & gas 8. Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah & daur ulang 9. <i>Real estate</i> 10. Penyediaan akomodasi & makan minum 11. Jasa perusahaan 12. Jasa keuangan & asuransi 13. Jasa kesehatan & kegiatan sosial 14. Jasa pendidikan 15. Jasa lainnya	1. Penyediaan akomodasi & makan minum 2. Industri pengolahan 3. Pengadaan listrik & gas 4. Kontruksi 5. Perdagangan besar & eceran, reparasi mobil & sepeda motor 6. Administrasi pemerintah, pertahanan dan jaminan sosial wajib 7. <i>Real estate</i> 8. Transportasi & pergudangan 9. Jasa kesehatan & kegiatan sosial 10. Jasa perusahaan 11. Informasi & komunikasi 12. Jasa pendidikan 13. Jasa keuangan & asuransi 14. Jasa lainnya	1. Pertanian, kehutanan, dan perikanan 2. Informasi & komunikasi 3. Industri pengolahan 4. Kontruksi 5. Penyediaan akomodasi & makan minum 6. Transportasi & pergudangan 7. Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah & daur ulang 8. Jasa perusahaan 9. Pertambangan & penggalian 10. Perdagangan besar & eceran, reparasi mobil & sepeda motor 11. Jasa pendidikan 12. Pengadaan listrik & gas 13. Jasa keuangan & asuransi 14. Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib 15. Jasa kesehatan & kegiatan sosial 16. Jasa lainnya

**Tabel 3. Hasil Analisis *Shift Share* di Kabupaten Ponorogo dan Kota Madiun**

Analisa	Kabupaten Ponorogo		Kota Madiun	
	2016-2017	2017-2018	2016-2017	2017-2018
<i>Shift Share (Potential Regional)</i>	1. Pengadaan listrik & gas 2. Pertambangan &	1. Industri pengolahan 2. Kontruksi	1. Industri pengolahan 2. Kontruksi	1. Industri pengolahan 2. Penyediaan

<p>Sektor yang mendorong pertumbuhan sektor yang sama di tingkat Provinsi Jawa Timur.</p>	<p>penggalian 3. Kontruksi 4. Industri pengolahan 5. Transportasi &amp; pergudangan 6. Informasi &amp; komunikasi 7. Jasa perusahaan 8. Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah &amp; daur ulang 9. Perdagangan besar &amp; eceran, reparasi mobil &amp; sepeda motor 10. Jasa kesehatan &amp; kegiatan sosial 11. Penyediaan akomodasi &amp; makan minum 12. Jasa pendidikan 13. Jasa lainnya</p>	<p>3. Penyediaan akomodasi &amp; makan minum 4. Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah &amp; daur ulang 5. Perdagangan besar &amp; eceran, reparasi mobil &amp; sepeda motor 6. <i>Real estate</i> 7. Transportasi &amp; pergudangan 8. Informasi &amp; komunikasi 9. Jasa kesehatan &amp; kegiatan sosial 10. Jasa perusahaan 11. Jasa pendidikan 12. Jasa lainnya</p>	<p>3. Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang 4. Transportasi &amp; pergudangan 5. Penyediaan akomodasi &amp; makan minum 6. Informasi &amp; komunikasi 7. Perdagangan besar &amp; eceran, reparasi mobil &amp; sepeda motor 8. Jasa kesehatan &amp; kegiatan sosial 9. Jasa perusahaan</p>	<p>akomodasi &amp; makan minum 3. Perdagangan besar &amp; eceran, reparasi mobil &amp; sepeda motor 4. Transportasi &amp; pergudangan 5. Jasa kesehatan &amp; kegiatan sosial 6. Jasa lainnya</p>
<p><i>Shift Share (Proportional Shift)</i> Sektor yang tumbuh relatif cepat ditingkat Provinsi Jawa Timur.</p>	<p>1. Pertambangan &amp; penggalian 2. Penyediaan akomodasi &amp; makan minum 3. Transportasi &amp; pergudangan 4. Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah &amp; daur ulang 5. Kontruksi 6. Perdagangan besar &amp; eceran, reparasi mobil &amp; sepeda motor 7. Industri pengolahan 8. Informasi &amp; komunikasi 9. Jasa perusahaan</p>	<p>1. Industri pengolahan 2. <i>Real estate</i> 3. Perdagangan besar &amp; eceran, reparasi mobil &amp; sepeda motor 4. Jasa kesehatan &amp; kegiatan sosial 5. Penyediaan akomodasi &amp; makan minum 6. Kontruksi 7. Informasi &amp; komunikasi 8. Transportasi &amp; pergudangan 9. Jasa perusahaan</p>	<p>1. Pertambangan &amp; penggalian 2. Transportasi &amp; pergudangan 3. Industri pengolahan 4. Perdagangan besar &amp; eceran, reparasi mobil &amp; sepeda motor 5. Penyediaan akomodasi &amp; makan minum 6. Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah &amp; daur ulang 7. Informasi &amp; komunikasi 8. Kontruksi 9. Jasa perusahaan</p>	<p>1. Industri pengolahan 2. <i>Real estate</i> 3. Perdagangan besar &amp; eceran, reparasi mobil &amp; sepeda motor 4. Kontruksi 5. Penyediaan akomodasi &amp; makan minum 6. Transportasi &amp; pergudangan 7. Informasi &amp; komunikasi 8. Jasa kesehatan &amp; kegiatan sosial 9. Jasa perusahaan</p>
<p><i>Shift Share (Differential Shift)</i> Sektor yang mempunyai</p>	<p>1. Penyediaan akomodasi &amp; makan minum 2. Industri pengolahan</p>	<p>1. Pertanian, kehutanan &amp; perikanan 2. <i>Real estate</i> 3. Pengadaan listrik &amp;</p>	<p>1. Industri pengolahan 2. <i>Real estate</i> 3. Pengadaan listrik &amp; gas</p>	<p>1. Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah &amp; daur ulang 2. Transportasi &amp;</p>

keuntungan lokasional.	3. Kontruksi 4. Transportasi & pergudangan 5. Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah & daur ulang 6. Informasi & komunikasi 7. <i>Real estate</i> 8. Jasa kesehatan & kegiatan sosial 9. Perdagangan besar & eceran, reparasi mobil & sepeda motor 10. Adminintrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib 11. Pengadaan listrik & gas 12. Jasa keuangan dan asuransi 13. Jasa pendidikan 14. Jasa perusahaan 15. Jasa lainnya	gas 4. Penyediaan akomodasi & makan minum 5. Industri pengolahan 6. Pertambangan & penggalian 7. Perdagangan besar & eceran, reparasi mobil & sepeda motor 8. Informasi & komunikasi 9. Kontruksi 10. Administrasi pemerintah, pertahanan dan jaminan sosial wajib 11. Transportasi & pergudangan 12. Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah & daur ulang 13. Jasa keuangan & asuransi 14. Jasa pendidikan 15. Jasa kesehatan & kegiatan sosial 16. Jasa lainnya	4. Transportasi & pergudangan 5. Jasa keuangan & asuransi 6. Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah & daur ulang 7. Jasa pendidikan 8. Administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib 9. Jasa perusahaan 10. Jasa kesehatan & kegiatan sosial	pergudangan 3. Administrasi Pengadaan listrik & gas 4. pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib 5. Perdagangan besar & eceran, reparasi mobil & sepeda motor 6. Pertanian, kehutanan, dan perikanan 7. Penyediaan akomodasi & makan minum 8. Jasa lainnya
---------------------------	---	--	---	---

Berdasarkan Tabel 2 dan Tabel 3, *Shift Share (Potensial Regional)* atau sektor pendorong pertumbuhan sektor yang sama di daerah lain, yaitu (1) Kabupaten Madiun tahun 2016-2017 terdapat 8 sektor, tahun 2017-2018 terdapat 14 sektor. (2) Kabupaten Magetan tahun 2016-2017 terdapat 9 sektor, tahun 2017-2018 terdapat 12 sektor. (3) Kabupaten Ponorogo tahun 2016-2017 terdapat 13 sektor, tahun 2017-2018 terdapat 12 sektor. (4) Kota Madiun tahun 2016-2017 terdapat 9 sektor, tahun 2017-2018 terdapat 6 sektor.

*Shift Share (Propotional Shift)* atau sektor yang pertumbuhannya relatif cepat di

tingkat provinsi yaitu (1) Kabupaten Madiun tahun 2016-2017 terdapat 9 sektor, tahun 2017-2018 terdapat 8 sektor. (2) Kabupaten Magetan tahun 2016-2017 terdapat 9 sektor, tahun 2017-2018 terdapat 9 sektor. (3) Kabupaten Ponorogo tahun 2016-2017 terdapat 9 sektor, tahun 2017-2018 terdapat 9 sektor. (4) Kota Madiun tahun 2016-2017 terdapat 9 sektor, tahun 2017-2018 terdapat 9 sektor.

*Shift Share (Different Shift)* atau sektor yang memiliki keuntungan lokasional, yaitu (1) Kabupaten Madiun tahun 2016-2017 terdapat 12 sektor, tahun 2017-2018 terdapat 15 sektor. (2) Kabupaten Magetan tahun 2016-2017 terdapat 14 sektor, tahun

2017-2018 terdapat 16 sektor. (3) Kabupaten Ponorogo tahun 2016-2017 terdapat 14 sektor, tahun 2017-2018 terdapat 16 sektor. (4) Kota Madiun tahun 2016-2017 terdapat 10 sektor, tahun 2017-2018 terdapat 8 sektor.

Sektor yang banyak bergeser di empat Kabupaten/Kota adalah sektor jasa keuangan & asuransi. Sektor tersebut bergeser setiap tahunnya di masing-masing Kabupaten/Kota tersebut dikarenakan adanya peningkatan tingkat ekonomi masyarakat di wilayah-wilayah tersebut. Sehingga hal itu mempengaruhi peningkatan sektor jasa keuangan & asuransi tersebut.

Sedangkan sektor yang tidak bergeser di empat Kabupaten/Kota adalah sektor jasa informasi & komunikasi dikarenakan minat masyarakat terhadap layanan sudah tidak begitu tinggi.

### Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu: (1) Sektor yang mendorong ekonomi Badan Kordinasi Wilayah Madiun di empat Kabupaten/Kota adalah sektor informasi & komunikasi, jasa pendidikan, jasa keuangan & asuransi, jasa kesehatan & kegiatan sosial. (2) Sektor Informasi & komunikasi, jasa pendidikan, jasa keuangan & asuransi, jasa kesehatan & kegiatan sosial, menjadi salah satu sektor basis dari 17 sektor dan berkontribusi terhadap PDRB Di Badan Kordinasi Wilayah Madiun khususnya di empat Kabupaten/Kota. (3) Sektor yang banyak bergeser di empat Kabupaten/Kota adalah sektor jasa keuangan & asuransi. (3) Sedangkan sektor yang tidak bergeser di wilayah empat Kabupaten/Kota adalah sektor jasa informasi & komunikasi

dikarenakan minat masyarakat terhadap layanan sudah tidak begitu tinggi. (4) Sektor yang tidak muncul pada tahun terakhir adalah administrasi pemerintah, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang, pertahanan & jaminan sosial wajib, dan pengadaan air.

### Saran

Sektor non-basis dapat menjadi pendukung bagi sektor basis untuk bisa lebih ditingkatkan agar pertumbuhan ekonomi serta ekonomi masyarakat di Bakorwil Madiun khususnya di empat Kabupaten/Kota. Lalu, Pemerintah setempat harus mendukung sektor basis agar keseimbangan antar sektor penggerak dan penompang dapat mencukupi perekonomian masyarakat sehingga diharapkan perekonomian masyarakat nantinya dapat lebih konsisten. Dengan terbentuknya sektor basis atau basis di Badan Kordinasi Wilayah Madiun khususnya di empat Kabupaten/Kota, maka pemerintah diharapkan ikut andil dalam memberikan peluang bagi para pengusaha untuk berinvestasi pada berbagai sektor untuk lebih dikembangkan.

### Daftar Pustaka

- Badan Pusat Statistik. “*Produk Domestik Bruto Lapangan Usaha*”. <https://www.bps.go.id/subject/11/produk-domestik-bruto--lapangan-usaha-.html>, 2016.
- Afiyanti, Yati. “Analisis Konsep Kualitas Hidup”. *Jurnal Keperawatan Indonesia* 13, no. 2 (2010): 81-86.
- Daryono, Soebagiyo. *Perekonomian Indonesia*. Cetakan ke 1: Jasmine, 2015.

- Elsjamina, Latuny. *Analisis Sektor Unggulan di Propinsi Maluku*. Maluku: Universitas Pattimura, 2014.
- Oktavia, Amanda Triyansih dan Farida Maria Elisabeth Uli. "Pentingnya Kebijakan Pendidikan Karakter Bagi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia". *Jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat* 7, no. 2 (2020): 1-9.
- Purnomo, Mochammad Arif dan Soejoto, Adi. "Analisis Sektor Unggulan dalam Struktur Perekonomian Kabupaten Lamongan". *Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE)* 1, no. 3 (2013): 1-16.
- Rahardja, Prathama dan Manurung, Mandala. *Teori Ekonomi Makro*. Jakarta: LPFEUI, 2008.
- Sadono, Sukirno. *Pengantar Mikro Ekonomi*. Jakarta: PT Raja Grafindo. Persada, 2005.
- Sjafrizal. *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2014.
- Suharmiati, Handayani Lestari, dan Kristiana Lusi. "Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Keterjangkauan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Daerah Terpencil Perbatasan di Kabupaten Sambas (Studi Kasus di Puskesmas Sajingan Besar)". *Buletin Penelitian Sistem Kesehatan* 15, no. 3 (2012): 223–231.
- Tarigan, Robinson. *Ekonomi Regional. Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara, 2005.
- Tjokroamidjojo, Bintoro. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Jakarta: PT. Pustaka LP3ES Indonesia, 1993.
- Widodo, Tri. *Perencanaan Pembangunan. Aplikasi Komputer (Era Otonomi Daerah)*. Yogyakarta: UUP STIM YKPN, 2006.